

Pengaruh Demokrasi dan Pengangguran terhadap Kriminalitas di Indonesia

Mustika Septiyas Trisilia^{1*}, Theresia Vera Selviana Assan²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: ¹mustika.trisilia@staf.undana.ac.id, ²theresia.assan@staf.undana.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ¹mustika.trisilia@staf.undana.ac.id

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan demokrasi dan pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia menggunakan data panel 22 provinsi di Indonesia. Penelitian ini lebih ditujukan untuk melihat pengaruh demokrasi dan pengangguran terhadap kriminalitas dalam bentuk kekerasan. Namun, tetap dilakukan analisis pengaruh terhadap kriminalitas properti sebagai perbandingan. Untuk mengatasi masalah endogeneitas dari variabel demokrasi, penelitian ini menggunakan metode *two-stage least square* (2SLS) dengan memasukkan indeks kebebasan sipil sebagai variabel instrumental. Penelitian ini menemukan bahwa demokrasi cenderung berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas dalam bentuk kekerasan (pembunuhan dan penculikan). Sementara itu, pengangguran cenderung berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas dalam bentuk properti (pencurian dengan pemberataan dan pencurian kendaraan bermotor), walaupun ditemukan juga pengaruh signifikan antara pengangguran dan penganiayaan berat.

Kata Kunci: Kriminalitas, Demokrasi, Pengangguran, Variabel Instrumental

Abstract—This study aims to analyze the relationship between democracy and unemployment on crime in Indonesia using panel data from 22 provinces. The primary focus is to examine the effects of democracy and unemployment on violent crime. However, the study also analyzes their impact on property crime as a comparison. To address the endogeneity problem associated with the democracy variable, the study employs the two-stage least squares (2SLS) method by incorporating the civil liberties index as an instrumental variable. The findings indicate that democracy tends to have a significant effect on violent crime, particularly homicide and kidnapping. Meanwhile, unemployment tends to have a significant effect on property crime, such as aggravated theft and motor vehicle theft, although a significant relationship is also found between unemployment and serious assault.

Keywords: Crime; Democracy; Unemployment; Instrumental Variable

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama peradaban yang besarnya selalu meningkat dari waktu ke waktu adalah kriminalitas. Kriminalitas menjadi masalah karena menciptakan biaya (*cost*) untuk para korban. [1] menyatakan nilai harta yang hilang, biaya pengobatan cedera, rasa sakit dan penderitaan, serta biaya peluang kehilangan waktu kerja merupakan biaya yang ditanggung oleh para korban.

Dalam rangka mengurangi biaya tersebut, beragam penelitian telah banyak dilakukan mengenai determinan kriminalitas. Salah satu faktor penting yang sampai saat ini masih terus dikaji adalah pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas. Hubungan kedua variabel tersebut masih menjadi perdebatan apakah pengangguran berpengaruh positif, negatif, atau tidak berpengaruh terhadap kriminalitas [2].

Secara empiris, pengangguran cenderung berkaitan dengan peningkatan kriminalitas properti, karena tekanan ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan pencurian atau perampokan. Selain itu, pengangguran jangka panjang juga ditemukan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kriminalitas kekerasan, yang diduga dipengaruhi oleh tekanan psikologis dan frustrasi yang berkepanjangan. Di samping itu, pengangguran, khususnya pada individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, juga berkaitan dengan peningkatan konsumsi narkoba serta tindak kriminal yang terkait.

Sejalan dengan temuan tersebut, [3], [4] menyatakan bahwa meskipun terdapat indikasi hubungan positif antara kriminalitas dan pengangguran, bukti empiris secara umum belum menunjukkan hubungan yang kuat. Pengaruh pengangguran cenderung lemah secara statistik pada tingkat kejahatan agregat, dengan pengaruh yang lebih kuat pada kriminalitas properti dibandingkan kriminalitas kekerasan. Sementara itu, [13] menemukan bahwa pengangguran laki-laki berpengaruh positif terhadap kriminalitas properti dan kriminalitas personal, meskipun pengaruh yang signifikan lebih konsisten terlihat pada kriminalitas personal.

Hasil yang cukup konsisten ditemukan [5], [6], [7] yang membedakan pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas ke dalam dua efek, yaitu *opportunity effect* dan *motivation effect*. Secara garis besar, temuan penelitian tersebut menyatakan bahwa pengaruh negatif (*opportunity effect*) terjadi pada kriminalitas yang berhubungan dengan personal atau kekerasan. Lalu, pengaruh positif (*motivation effect*) terjadi pada kriminalitas yang berhubungan dengan properti.

Penelitian [8] mengungkapkan bahwa korelasi yang lemah antara pengangguran dan kriminalitas yang ditemukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya diakibatkan karena pengangguran memiliki dua efek berlawanan. Di satu sisi, peningkatan pengangguran akibat melemahnya kondisi ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal karena tekanan ekonomi yang meningkat. Namun, di sisi lain, pelemahan ekonomi secara agregat juga mengurangi ketersediaan serta kerentanan target kejahatan, sehingga peluang terjadinya kriminalitas justru menurun. Selain itu, mereka menekankan bahwa peningkatan motivasi untuk melakukan kejahatan cenderung muncul setelah pengangguran berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sedangkan perubahan peluang kejahatan terjadi secara langsung seiring dengan perubahan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun secara umum hubungan antara pengangguran dan kriminalitas mencerminkan adanya *opportunity effect* dan *motivation effect*, temuan empiris menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan lebih banyak terjadi pada kriminalitas properti. Sebaliknya, bukti mengenai hubungan tersebut pada kriminalitas kekerasan cenderung lebih lemah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan langsung antara pengangguran dan kriminalitas kekerasan dalam kerangka teori ekonomi kriminalitas.

Berbeda dengan kriminalitas properti yang lebih disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi, kriminalitas kekerasan dimungkinkan lebih dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Hal-hal yang berkaitan dengan psikologi, misalnya konsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol yang memicu ketidakstabilan emosi, serta usia yang belum cukup matang secara emosional. Lalu, faktor lain yang diindikasikan mempengaruhi kriminalitas kekerasan adalah demokrasi.

Hubungan demokrasi dan kriminalitas kekerasan bersifat multidimensional. Di satu sisi, demokrasi dapat menurunkan kriminalitas kekerasan melalui *due process* yang meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan mendorong penyelesaian konflik secara legal. Di sisi lain, demokrasi juga tidak sepenuhnya bebas dari kekerasan, karena dalam kondisi tertentu negara demokratis dapat menggunakan kekerasan untuk menjaga ketertiban atau merespons ancaman, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Selain itu, transisi menuju demokrasi dapat tanpa sengaja meningkatkan risiko kekerasan karena terbukanya kompetisi politik, kebebasan berekspresi, dan reformasi keamanan, terutama di negara pascakonflik atau yang lemah secara institusional.

Penelitian [9] mengungkapkan bahwa terdapat beberapa perspektif berbeda dalam menjelaskan hubungan demokrasi dan kriminalitas kekerasan. Perspektif peradaban memprediksi bahwa tingkat kriminalitas kekerasan akan menurun seiring dengan berkembangnya demokratisasi, karena adanya peningkatan nilai-nilai sipil dan kontrol sosial. Sebaliknya, perspektif konflik berpendapat bahwa kriminalitas kekerasan justru meningkat akibat dampak negatif ekonomi pasar yang sering kali menyertai proses demokratisasi. Sementara itu, perspektif modernisasi menyatakan bahwa kriminalitas kekerasan cenderung meningkat pada tahap awal transisi menuju demokrasi, namun akan menurun setelah sistem demokrasi menjadi lebih matang dan stabil.

Oleh karena itu, penelitian ini lebih difokuskan untuk menganalisis pengaruh demokrasi dan pengangguran terhadap kriminalitas kekerasan. Unit analisis yang dipilih ialah Indonesia karena masih jarang penelitian mengenai hubungan demokrasi dan pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia. Tidak hanya kriminalitas kekerasan, pengaruh terhadap kriminalitas properti juga akan dilakukan sebagai perbandingan.

Untuk melihat hubungan demokrasi dan pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia, penelitian ini menggunakan data panel 22 provinsi di Indonesia periode 2009-2016. Variabel instrumental dengan pendekatan *two-stage least square* (2SLS) juga akan digunakan dalam analisis. Penelitian ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian 1 menceritakan latar belakang penelitian, Bagian 2 menjelaskan metodologi penelitian, Bagian 3 melaporkan hasil penelitian dan pembahasan, serta Bagian 4 berisi kesimpulan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Data

Penelitian ini menggunakan data panel 22 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Data dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan *World Bank*. Duabelas provinsi di Indonesia, yaitu Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua terpaksa harus dikeluarkan dari sampel. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan data pada 12 provinsi tersebut.

2.2 Variabel dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu pada penelitian [10], yaitu jumlah kriminalitas dalam bentuk kekerasan/personal dan properti yang dikumpulkan oleh Kepolisian Daerah. Kriminalitas dalam bentuk kekerasan/personal, meliputi pembunuhan (LPembunuhan), perkosaan (LPerkosaan),

penganiayaan ringan (LPenganiayaanringan), penganiayaan berat (LPenganiayaanberat), dan penculikan (LPenculikan). Lalu, kriminalitas yang berkaitan dengan properti, meliputi pencurian dengan pemberatan (LPencurianpemberatan), pencurian dengan kekerasan (LPencuriankekerasa), pencurian biasa (LPencurianbiasa), pencurian kendaraan bermotor (LPencurianbermotor). Semua variabel dependen dibentuk dalam logaritma natural.

2.3 Variabel independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah demokrasi dan pengangguran. Mengacu pada penelitian [20], indeks yang digunakan dalam mengukur demokrasi adalah indeks hak politik (Demokrasi), sedangkan pengangguran diukur menggunakan tingkat pengangguran terbuka (Pengangguran). Beberapa variabel kontrol yang mengacu pada penelitian [11] juga dimasukkan ke dalam model, seperti tingkat penyelesaian kriminalitas oleh kepolisian (Clearancerate) dan rasio gini (Rasiogini).

Selain itu, jumlah penduduk dalam bentuk logaritma natural (LPenduduk), angka partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 (APS16-18), dan angka partisipasi sekolah kelompok usia 19-24 (APS19-24) juga dipilih sebagai variabel kontrol. Pemilihan variabel jumlah penduduk didasarkan dari pernyataan [1], yaitu kriminalitas lebih tinggi dua kali lebih banyak di kota besar (setidaknya penduduk berjumlah 250.000) dibandingkan di kota kecil (penduduk kurang dari 10.000). Lalu, pemilihan angka partisipasi sekolah didasarkan pada pernyataan bahwa pendidikan akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan kerja yang sah sehingga menurunkan kriminalitas: lulusan SMA memiliki peluang hampir 1,5 kali lebih besar dari mereka yang putus sekolah dan lulusan perguruan tinggi memiliki peluang hampir 2 kali lebih besar dari lulusan SMA[9].

2.4 Metode

Model yang digunakan dalam penelitian ini memodifikasi model penelitian yang dilakukan oleh [12]. Bentuk model yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

$$LY_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{Demokrasi}_{it} + \beta_2 \text{Pengangguran}_{it} + \beta_3 \text{Clearancerate}_{it} + \beta_4 \text{Rasiogini}_{it} + \beta_5 \text{LPenduduk}_{it} + \beta_6 \text{APS16-18}_{it} + \beta_7 \text{APS19-24}_{it} + \text{Dummy Tahun} + \varepsilon_{it} \quad (1.1)$$

Notasi LY merupakan logaritma natural jumlah kriminalitas untuk pembunuhan, perkosaan, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penculikan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, dan pencurian kendaraan bermotor. Demokrasi merupakan indeks hak politik. Pengangguran merupakan tingkat pengangguran terbuka. *Clearancerate* merupakan tingkat penyelesaian kriminalitas oleh kepolisian. *Rasiogini* merupakan rasio gini. *LPenduduk* merupakan logaritma natural jumlah penduduk. *APS16-18* merupakan angka partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 tahun. *APS19-24* merupakan angka partisipasi sekolah kelompok usia 19-24 tahun. *Dummy Tahun* merupakan vektor *dummy* tahun.

Model ini akan menghasilkan estimasi yang bias apabila hanya diestimasi menggunakan *ordinary least squares* (OLS). Hal tersebut dikarenakan demokrasi dimungkinkan bukan merupakan variabel *exogenous* (terdapat *unobserved heterogeneity*). [12] menyatakan bahwa ada kemungkinan masalah *simultaneity* jika kriminalitas juga mempengaruhi demokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan metode khusus untuk meminimalisir bias akibat variabel *omitted* ataupun *simultaneity*, salah satunya adalah dengan menggunakan variabel instrumental.

Mengacu pada penelitian [12], variabel instrumental yang akan digunakan untuk variabel demokrasi adalah variabel indeks kebebasan sipil (*civil liberty index*). Kebebasan sipil yang mengacu pada kebebasan berbicara dan hak individu diasumsikan tidak memiliki dampak langsung pada kriminalitas, tidak seperti demokrasi (hak politik) yang terkait dengan hukuman dan prosedur penegakan hukum yang secara langsung dapat mempengaruhi kriminalitas. Oleh karena itu, kebebasan sipil dapat mempengaruhi kriminalitas hanya melalui hak politik.

Untuk mendapatkan hasil estimasi yang konsisten dan tidak bias, instrumental variabel diestimasi dengan menggunakan dua tahap yang disebut *two-stage least square* (2SLS). Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengestimasi variabel *endogenous* (demokrasi) dengan instrumental yang telah ditentukan (kebebasan sipil), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Demokrasi} = \alpha + \beta_1 \text{Civilliberty}_{it} + \beta_2 \text{Pengangguran}_{it} + \beta_3 \text{Clearancerate}_{it} + \beta_4 \text{Rasiogini}_{it} + \beta_5 \text{LPenduduk}_{it} + \beta_6 \text{APS16-18}_{it} + \beta_7 \text{APS19-24}_{it} + \text{Dummy Tahun} + \varepsilon_{it} \quad (1.2)$$

Setelah mendapatkan nilai prediktor demokrasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan nilai prediktor tersebut sebagai variabel penjelas dalam estimasi tahap kedua, yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Demokrasi}_{it} + \beta_2 \text{Pengangguran}_{it} + \beta_3 \text{Clearancerate}_{it} + \beta_4 \text{Rasiogini}_{it} + \beta_5 \text{LPenduduk}_{it} + \beta_6 \text{APS16-18}_{it} + \beta_7 \text{APS19-24}_{it} + \text{Dummy Tahun} + \varepsilon_{it} \quad (1.3)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi dilakukan menggunakan metode *Pooled Ordinary Least Square* (OLS) dan *Two Stage Least Square* (2SLS) terhadap kriminalitas kekerasan yang hasilnya ditunjukkan dalam tabel 1. Hasil uji OLS dan 2SLS menunjukkan bahwa demokrasi berpengaruh positif terhadap pembunuhan, penculikan, perkosaan, dan penganiayaan berat, serta berpengaruh negatif terhadap penganiayaan ringan. Peningkatan 1 indeks demokrasi hanya signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan pembunuhan dan penculikan, yaitu sebesar 0,0171 dan 0,0393 % untuk OLS serta 0,188 dan 0,204% untuk 2SLS secara berurutan. Perkosaan dan penganiayaan ringan ditemukan tidak signifikan, sedangkan penganiayaan berat hanya signifikan untuk POLS sebesar 0,0456%. Temuan ini mendukung temuan [13] yang menemukan bahwa demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembunuhan, tetapi tidak dengan temuan [1].

Pengangguran ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penganiayaan berat, yaitu sebesar 0,157% untuk POLS dan 0,176% untuk 2SLS. Hubungan positif antara kedua variabel tersebut sejalan dengan penemuan [9], [12], [14]. Lalu, pengaruh negatif tidak signifikan ditemukan terhadap pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan ringan, sedangkan penculikan tidak konsisten, yaitu positif signifikan untuk OLS dan negatif tidak signifikan untuk 2SLS.

Hubungan positif signifikan untuk semua variabel dependen ditemukan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Temuan ini mendukung pernyataan [15] bahwa tingkat kriminalitas cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya ukuran kota. Hal tersebut dikarenakan kota besar menawarkan target yang lebih menguntungkan dan probabilitas tertangkap yang rendah [11], [16].

Pengaruh menarik ditemukan antara rasio gini terhadap kriminalitas kekerasan. Rasio gini ditemukan berpengaruh negatif untuk semua variabel dependen, walaupun pengaruh signifikan hanya ditemukan terhadap perkosaan dan penganiayaan berat. Temuan ini berlawanan dengan temuan [14].

Hubungan negatif antara rasio gini dan kriminalitas kekerasan dikarenakan wilayah dengan ketimpangan tinggi di Indonesia cenderung didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah dan hanya sebagian kecil yang berada pada lapisan menengah ke atas. Oleh karena itu, gesekan yang terjadi akibat adanya peningkatan rasio gini cenderung kecil karena hanya berpengaruh pada sebagian kecil masyarakat (hanya kelompok minoritas yang semakin kaya), sedangkan kelompok lainnya berada pada posisi yang sama dan memiliki insentif kecil untuk terlibat kriminalitas. Sementara itu, hubungan yang lemah ditemukan antara angka partisipasi sekolah dan tingkat penyelesaian kriminalitas oleh kepolisian (*clearance rate*) terhadap semua variabel dependen [2].

Selanjutnya, sebagai perbandingan dilakukan pula analisis POLS dan 2SLS terhadap kriminalitas properti yang hasilnya ditampilkan pada tabel 2. Hasil tersebut menemukan bahwa demokrasi berpengaruh positif terhadap pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian biasa untuk estimasi POLS dan 2SLS. Lalu, pengaruh demokrasi terhadap pencurian kendaraan bermotor ditemukan positif untuk estimasi POLS dan negatif untuk 2SLS. Sebagian besar hasil tersebut ditemukan tidak signifikan, kecuali untuk pencurian dengan pemberatan (POLS) dan pencurian dengan kekerasan (POLS). Pengaruh positif tersebut sejalan dengan temuan [14].

Pengangguran ditemukan berpengaruh negatif terhadap pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian biasa, serta berpengaruh positif terhadap pencurian kendaraan bermotor. Pengaruh negatif signifikan ditemukan terhadap pencurian dengan pemberatan sebesar 0,0692% untuk POLS dan 2SLS, sedangkan terhadap pencurian dengan kekerasan hubungan negatif signifikan hanya ditemukan pada POLS sebesar 0,0683%. Lalu, hubungan positif signifikan ditemukan terhadap pencurian kendaraan bermotor sebesar 0,0547% (POLS) dan 0,096% (2SLS), sama dengan temuan [11], [12].

Selain itu, pengaruh negatif juga ditemukan antara *clearance rate* dan pencurian dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak tingkat kriminalitas yang ditangani kepolisian, meningkatkan probabilitas tertangkap, sehingga menurunkan motivasi seseorang untuk melakukan kriminalitas. Lalu, hubungan antara jumlah penduduk terhadap semua variabel kriminalitas properti menghasilkan temuan yang sama dengan kriminalitas kekerasan, yaitu berpengaruh positif signifikan.

Berbeda dengan kriminalitas properti, tidak ditemukan bukti hubungan yang kuat antara rasio gini untuk semua variabel dependen. Namun, angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun ditemukan berpengaruh positif dan signifikan untuk semua variabel independen. Selain itu, angka partisipasi sekolah usia 19-24 juga ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap pencurian dengan kekerasan. Temuan ini mendukung pernyataan [9]

yang menyatakan bahwa meningkatnya tingkat pendidikan akan berpengaruh pada meningkatnya peluang mendapatkan kerja sah, sehingga menurunkan kriminalitas.

Tabel 1. Hasil estimasi pengaruh demokrasi terhadap kriminalitas kekerasan: POLS vs. 2SLS.

	Pembunuhan		Perkosaan		Penganiayaan ringan		Penganiayaan berat		Penculikan	
	POLS	2SLS	POLS	2SLS	POLS	2SLS	POLS	2SLS	POLS	2SLS
Demokrasi	0.0171** (2.14)	0.188* (1.87)	0.00752 (0.91)	0.0231 (0.43)	-0.00589 (-0.45)	-0.123 (-1.20)	0.0456*** (4.13)	0.00418 (0.06)	0.0393*** (3.60)	0.204* (1.87)
Pengangguran	-0.00810 (-0.33)	-0.0833 (-1.30)	-0.0117 (-0.45)	-0.0186 (-0.54)	-0.0596 (-1.47)	-0.00791 (-0.12)	0.157*** (4.57)	0.176*** (3.73)	0.0652* (1.91)	-0.00747 (-0.11)
Clearancerate	0.00549 (1.36)	0.000528 (0.06)	0.00345 (0.82)	0.00300 (0.69)	-0.00400 (-0.61)	-0.000589 (-0.07)	-0.00228 (-0.41)	-0.00108 (-0.18)	-0.00301 (-0.54)	-0.00781 (-0.88)
Rasiogini	-4.079** (-2.16)	-5.922 (-1.60)	-6.023*** (-3.07)	-6.191*** (-3.12)	-2.024 (-0.66)	-0.758 (-0.20)	-10.95*** (-4.20)	-10.50*** (-3.86)	-1.046 (-0.40)	-2.826 (-0.70)
Ljumlah penduduk	0.437*** (7.03)	0.499*** (4.09)	0.369*** (5.71)	0.374*** (5.72)	0.456*** (4.50)	0.412*** (3.31)	0.667*** (7.77)	0.652*** (7.26)	0.589*** (6.92)	0.650*** (4.90)
APS1618	-0.00352 (-0.28)	-0.0242 (-0.91)	-0.0131 (-0.99)	-0.0150 (-1.05)	0.0178 (0.86)	0.0320 (1.17)	-0.0260 (-1.48)	-0.0210 (-1.07)	0.00223 (0.13)	-0.0178 (-0.61)
APS1924	-0.00909 (-0.76)	-0.00782 (-0.35)	0.00614 (0.49)	0.00626 (0.52)	0.0344* (1.75)	0.0335 (1.45)	0.0209 (1.25)	0.0206 (1.24)	0.0261 (1.58)	0.0273 (1.11)
_cons	-2.733* (-1.92)	-10.22** (-2.00)	0.656 (0.44)	-0.0291 (-0.01)	-0.873 (-0.38)	4.270 (0.82)	-3.832* (-1.94)	-2.017 (-0.54)	-9.439*** (-4.83)	- (-3.00)
N	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176

Sumber: Hasil diolah dengan *Stata 13*

Notes. (1) Variabel dependen dalam logaritma natural.

(2) *t* statistics dalam tanda kurung. Menggunakan *dummy* tahun.

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Tabel 2. Hasil estimasi pengaruh demokrasi terhadap kriminalitas properti: POLS vs. 2SLS.

	Pencurian dengan pemberatan		Pencurian dengan kekerasan		Pencurian biasa		Pencurian kendaraan bermotor	
	POLS	2SLS	POLS	2SLS	POLS	2SLS	POLS	2SLS
Demokrasi	0.0190* (1.90)	0.0190 (0.30)	0.0210* (1.95)	0.0201 (0.29)	0.00343 (0.51)	0.00673 (0.16)	0.0117 (1.15)	-0.0821 (-1.02)
Pengangguran	-0.0692** (-2.22)	-0.0692* (-1.69)	-0.0683** (-2.03)	-0.0679 (-1.54)	-0.0339 (-1.62)	-0.0354 (-1.29)	0.0547* (1.72)	0.0960* (1.87)
Clearancerate	-0.00760 (-1.50)	-0.00760 (-1.46)	-0.0111** (-2.03)	-0.0111** (-1.97)	0.00128 (0.37)	0.00118 (0.34)	-0.00513 (-0.99)	-0.00240 (-0.37)
Rasiogini	-2.537 (-1.07)	-2.537 (-1.07)	-1.718 (-0.67)	-1.707 (-0.67)	-1.161 (-0.73)	-1.197 (-0.75)	-1.840 (-0.77)	-0.828 (-0.28)
LJumlahpenduduk	1.031*** (13.23)	1.031*** (13.20)	1.095*** (13.06)	1.095*** (13.02)	0.371*** (7.10)	0.372*** (7.10)	1.065*** (13.45)	1.031*** (10.50)
APS1618	0.0326** (2.04)	0.0326* (1.91)	0.0611*** (3.56)	0.0612*** (3.33)	0.0313*** (2.92)	0.0309*** (2.69)	0.0595*** (3.67)	0.0709*** (3.30)
APS1924	-0.0211 (-1.39)	-0.0211 (-1.46)	-0.0392** (-2.41)	-0.0392** (-2.52)	0.00641 (0.63)	0.00643 (0.66)	-0.0213 (-1.39)	-0.0220 (-1.21)
_cons	-9.723*** (-5.44)	-9.724*** (-2.97)	-14.16*** (-7.36)	-14.12*** (-4.01)	-0.743 (-0.62)	-0.887 (-0.40)	-14.03*** (-7.72)	-9.920** (-2.41)
N	176	176	176	176	176	176	176	176

Sumber: Hasil diolah dengan *Stata 13*

Notes. (1) Variabel dependen dalam logaritma natural.

(2) *t* statistics dalam tanda kurung. Menggunakan *dummy* tahun.

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi 2SLS menggunakan indeks kebebasan sipil sebagai variabel instrumental, dapat disimpulkan bahwa demokrasi cenderung berpengaruh positif terhadap kriminalitas kejahatan. Pengaruh signifikan tersebut khususnya terjadi terhadap pembunuhan dan penculikan. Temuan ini mendukung perspektif yang diungkapkan oleh kelompok konflik yang mengungkapkan bahwa kriminalitas kekerasan akan meningkat seiring dengan efek brutal ekonomi pasar yang sejauh ini secara universal disertai demokratisasi.

Sebaliknya, ditemukan hubungan yang lemah antara demokrasi dan kriminalitas properti. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan motivasi seseorang untuk melakukan kriminalitas kejahatan dan properti. Kriminalitas kekerasan cenderung dimotivasi oleh hal-hal yang berhubungan dengan psikologis, seperti ketidakbahagiaan. Sementara itu, kriminalitas properti cenderung dimotivasi oleh hal-hal yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, seperti hilangnya mata pencaharian yang sah.

Hal tersebut didukung dengan temuan bahwa pengangguran cenderung berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas properti. Pengaruh negatif signifikan ditemukan terhadap pencurian dengan pemberatan dan pengaruh positif signifikan terhadap pencurian kendaraan bermotor. Namun, terdapat pula bukti hubungan positif signifikan antara pengangguran dan penganiayaan berat.

Hubungan negatif antara pengangguran dan pencurian dengan pemberatan secara tidak langsung diakibatkan oleh *clearance rate*. *Clearance rate* ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap pencurian dengan pemberatan. Probabilitas yang semakin tinggi untuk tertangkap berdampak pada menurunnya tindakan tersebut, terlebih pencurian dengan pemberatan cenderung dilakukan secara individu. Berbeda halnya dengan pencurian kendaraan bermotor yang cenderung dilakukan secara berkelompok dan terorganisir, *clearance rate* tidak berpengaruh signifikan. Oleh karenanya, pelemahan aktivitas ekonomi cenderung memotivasi seseorang untuk terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor dibandingkan pencurian dengan pemberatan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah data runtut waktu yang digunakan terlalu pendek untuk dapat menggambarkan dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia. Selain itu, determinan digeneralisasi untuk semua jenis kriminalitas yang berpotensi untuk menghasilkan estimasi yang bias mengingat adanya perbedaan motivasi dari setiap jenis kriminalitas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data runtut waktu yang lebih panjang untuk menggambarkan dinamika demokrasi. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih detail, penelitian dapat dilakukan dengan memfokuskan analisis pada satu jenis kriminalitas dan mengontrol variabel-variabel yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam model.

REFERENCES

- [1] M. S. Shaari, N. Z. Abidin, T. B. Majekodunmi, M. J. Abd Rani, A. R. Ridzuan, and B. D. Handayani, 'Female empowerment and crime patterns in Malaysia: A non-linear analysis', *Social Sciences and Humanities Open*, vol. 9, 2024, doi: 10.1016/j.ssaho.2023.100798.
- [2] D. Montolioa, 'The Effects of Local Infrastructure Investment on Crime', *Labour Economics*, 2018, doi: 10.1016/j.labeco.2018.02.006.
- [3] A. Atmadi, N. R. Tarigan, I. P. A. B. P. C. Negara, N. Syalaisa, and M. I. A. Ismail, 'Linear mixed model approach: The effect of poor people & unemployment rate on various types of crime in 34 provinces in Indonesia', *Int. J. Appl. Math. Sci. Technol. Nat. Def*, vol. 2, no. 1, pp. 37-48, 2024, doi: 10.58524/app.sci.def.v2i1.350.
- [4] E. P. Kurniasih, N. Andini, M. Kartika, N. F. Dosinta, N. F. Hamsyi, and I. Iqbal, 'Unveiling the links: How poverty, unemployment, education, and income inequality drive crime in Indonesia', *Al-Uqud: J. Islamic Econ*, vol. 8, no. 2, pp. 189-210, 2024, doi: 10.26740/al-uqud.v8n2.p189-210.
- [5] A. Ruggeri, U. Daxecker, and N. Prasad, 'Political violence in democracies: An Introduction', *J. Peace Res*, vol. 62, no. 5, pp. 1363-1375, 2025, doi: 10.1177/00223433251351251.
- [6] K. Klaus and M. Turnbull, 'Democracy dismissed: When leaders and citizens choose election violence', *J. Peace Res*, vol. 62, no. 5, pp. 1447-1462, 2025, doi: 10.1177/00223433251352662.

- [7] 'United Nations Office on Drugs and Crime, "Chair's summaries on the 2021 to 2024 thematic discussions of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice on the implementation of the Kyoto Declaration', UNODC Report, Jan. 2025.
- [8] A. W. Astuti *et al.*, 'Pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kriminalitas dengan kemiskinan sebagai variabel intervening di Indonesia', *Jurnal TAMBORA*, vol. 9, no. 1, 2025, doi: 10.36761/tambora.v9i1.5111.
- [9] F. S. Kasim and H. Hendra, 'Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap tindakan kriminal di Kabupaten Tolitoli periode 2012–2021', *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 2, no. 2, pp. 11-20, 2023.
- [10] J. A. Kasma and Y. P. Sari, 'Faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas di Indonesia', *Media Riset Ekonomi Pembangunan*, pp. 312-321, 2024.
- [11] E. Y. Malentang, E. N. Walewangko, and H. F. Siwu, 'Pengaruh pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado', in *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2022, pp. 133-144,.
- [12] R. Pratama and S. Lestari, 'Analisis hubungan pengangguran dengan kriminalitas di Jawa Tengah', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 13, no. 2, pp. 145-158, 2023.
- [13] H. Siregar and M. Lubis, 'Demokrasi dan kekerasan politik lokal di Sumatera Utara', *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, vol. 9, no. 1, pp. 55-70, 2022.
- [14] L. A. Putri and R. Hidayat, 'Pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas: Studi empiris di Indonesia', *Jurnal Paradigma Ekonomi*, vol. 7, no. 2, pp. 101-115, 2024.
- [15] S. Nugroho, 'Kekerasan dalam demokrasi lokal: Studi kasus pemilu daerah', *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, vol. 5, no. 1, pp. 77-89, 2023.
- [16] M. R. Santoso, 'Hubungan pengangguran dengan tingkat kriminalitas di Indonesia: Analisis data panel', *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, vol. 12, no. 3, pp. 210-225, 2025.